



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 4333/SEK/PW1.1.1/XI/2024 Jakarta, 15 November 2024  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Publikasi QR Code Survei Penilaian Integritas 2024

- Yth
1. Para Sekretaris Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
  2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
  3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Terlampir;
  4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Terlampir.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 Mahkamah Agung RI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Periode Pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang semula berakhir tanggal 31 Oktober 2024 diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal **30 November 2024**;
2. Mengingat masih rendahnya persentase pengisian survei oleh responden eksternal maka dalam rangka meningkatkan *response rate* responden eksternal, unit kerja diminta untuk mempublikasikan QR Code Pengisian Survei (<https://bit.ly/QRCODEEKS-SPIMARI24>) di area pelayanan sampai dengan 30 November 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. QR Code dipergunakan untuk pengisian survei responden eksternal masyarakat penerima layanan atau rekanan/penyedia pada unit kerja;
  - b. Bagi unit kerja yang tidak memiliki layanan publik, maka responden eksternal dimaksimalkan terhadap rekanan/penyedia yang pernah bekerja sama dengan unit kerja tersebut;
  - c. QR Code digunakan oleh seluruh unit eselon I dan satuan kerja yang terpilih menjadi sampel acak dalam pelaksanaan SPI 2024 (terlampir);
  - d. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama menggunakan QR Code Direktorat Jenderal masing-masing;
  - e. Unit kerja dapat menggunakan format QR Code pada tautan <https://bit.ly/TEMPLATE-QRCODE> atau membuat desain QR Code sendiri.
3. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Hendra (0812-9584-246) atau Sdr. Abu (0812-3919-770).

Survei Penilaian Integritas (SPI) Mahkamah Agung RI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atas resiko korupsi, memetakan resiko korupsi, dan mengukur integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, agar Mahkamah Agung RI dapat merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem antikorupsi sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, Pimpinan Mahkamah Agung memerintahkan seluruh warga peradilan turut menyukseskan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Mahkamah Agung RI 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Sugiyanto



LAMPIRAN

Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Nomor : 4333/SEK/PW1.1.1/XI/2024

Tanggal : 15 November 2024

**DAFTAR SATUAN KERJA SAMPEL ACAK  
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS 2024**

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA</b>
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
2	KEPANITERAAN
3	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
4	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
5	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
6	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
7	BADAN PENGAWASAN
8	PENGADILAN TINGGI BANDUNG
9	PENGADILAN TINGGI DENPASAR
10	PENGADILAN TINGGI JAKARTA
11	PENGADILAN TINGGI JAMBI
12	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
13	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA
14	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
15	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
16	PENGADILAN TINGGI MANADO
17	PENGADILAN TINGGI PADANG
18	PENGADILAN TINGGI PANGKARAYA
19	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT
20	PENGADILAN TINGGI RIAU
21	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
22	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
23	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	SATUAN KERJA
24	PENGADILAN NEGERI AMBON
25	PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
26	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR
27	PENGADILAN NEGERI BAJAWA
28	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
29	PENGADILAN NEGERI BANDUNG
30	PENGADILAN NEGERI BANGKO
31	PENGADILAN NEGERI BANJAR
32	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
33	PENGADILAN NEGERI BANTAENG
34	PENGADILAN NEGERI BANYMAS
35	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
36	PENGADILAN NEGERI BARABAI
37	PENGADILAN NEGERI BARRU
38	PENGADILAN NEGERI BATANG
39	PENGADILAN NEGERI BATU LICIN
40	PENGADILAN NEGERI BATURAJA
41	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR
42	PENGADILAN NEGERI BEKASI
43	PENGADILAN NEGERI BENGKULU
44	PENGADILAN NEGERI BIAK
45	PENGADILAN NEGERI BIHEREUN
46	PENGADILAN NEGERI BIMA
47	PENGADILAN NEGERI BONTANG
48	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
49	PENGADILAN NEGERI BUNTOK
50	PENGADILAN NEGERI CIANJUR
51	PENGADILAN NEGERI CIBADAK
52	PENGADILAN NEGERI CIBINONG
53	PENGADILAN NEGERI CIKARANG

NO	SATUAN KERJA
54	PENGADILAN NEGERI CIREBON
55	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA
56	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP
57	PENGADILAN NEGERI DOMPU
58	PENGADILAN NEGERI DUMAI
59	PENGADILAN NEGERI ENDE
60	PENGADILAN NEGERI ENREKANG
61	PENGADILAN NEGERI FAK-FAK
62	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN
63	PENGADILAN NEGERI GRESIK
64	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
65	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
66	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
67	PENGADILAN NEGERI JANTHO
68	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
69	PENGADILAN NEGERI JOMBANG
70	PENGADILAN NEGERI KAJEN
71	PENGADILAN NEGERI KALABAHI
72	PENGADILAN NEGERI KALIANDA
73	PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
74	PENGADILAN NEGERI KASONGAN
75	PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
76	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG
77	PENGADILAN NEGERI KISARAN
78	PENGADILAN NEGERI KOTA BARU
79	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI
80	PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
81	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
82	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN
83	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG

NO	SATUAN KERJA
84	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
85	PENGADILAN NEGERI KUDUS
86	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN
87	PENGADILAN NEGERI KUPANG
88	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT (SENDAWAR)
89	PENGADILAN NEGERI LAHAT
90	PENGADILAN NEGERI LEMBATA
91	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
92	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
93	PENGADILAN NEGERI LUWUK
94	PENGADILAN NEGERI MAGETAN
95	PENGADILAN NEGERI MAJENE
96	PENGADILAN NEGERI MALUKU UTARA
97	PENGADILAN NEGERI MAMUJU
98	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
99	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE
100	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
101	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
102	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
103	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
104	PENGADILAN NEGERI MUARO
105	PENGADILAN NEGERI MUKO MUKO
106	PENGADILAN NEGERI MUNGKID
107	PENGADILAN NEGERI NABIRE
108	PENGADILAN NEGERI NAMLEA
109	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
110	PENGADILAN NEGERI NEGARA
111	PENGADILAN NEGERI NGANJUK
112	PENGADILAN NEGERI NGAWI
113	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

NO	SATUAN KERJA
114	PENGADILAN NEGERI PACITAN
115	PENGADILAN NEGERI PADANG
116	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
117	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
118	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
119	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
120	PENGADILAN NEGERI PALU
121	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN
122	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
123	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
124	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE
125	PENGADILAN NEGERI PARINGIN
126	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
127	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
128	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN
129	PENGADILAN NEGERI PASURUAN
130	PENGADILAN NEGERI PATI
131	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
132	PENGADILAN NEGERI PELAIHARI
133	PENGADILAN NEGERI PONOROGO
134	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
135	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
136	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
137	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
138	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
139	PENGADILAN NEGERI RANAI
140	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
141	PENGADILAN NEGERI REMBANG
142	PENGADILAN NEGERI RUTENG
143	PENGADILAN NEGERI SALATIGA

NO	SATUAN KERJA
144	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
145	PENGADILAN NEGERI SAMPANG
146	PENGADILAN NEGERI SANGATA
147	PENGADILAN NEGERI SANGGAU
148	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
149	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
150	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
151	PENGADILAN NEGERI SEKAYU
152	PENGADILAN NEGERI SELONG
153	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
154	PENGADILAN NEGERI SENGKANG
155	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
156	PENGADILAN NEGERI SIDRAP
157	PENGADILAN NEGERI SIGLI
158	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
159	PENGADILAN NEGERI SINABANG
160	PENGADILAN NEGERI SINGKIL
161	PENGADILAN NEGERI SLEMAN
162	PENGADILAN NEGERI SOA SIO
163	PENGADILAN NEGERI SOLOK
164	PENGADILAN NEGERI SRAGEN
165	PENGADILAN NEGERI STABAT
166	PENGADILAN NEGERI SUKADANA
167	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
168	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
169	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
170	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
171	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
172	PENGADILAN NEGERI TAKALAR
173	PENGADILAN NEGERI TAKENGON



NO	SATUAN KERJA
174	PENGADILAN NEGERI TANGGAMUS
175	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG
176	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN
177	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI
178	PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
179	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
180	PENGADILAN NEGERI TEGAL
181	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
182	PENGADILAN NEGERI TJ. JABUNG TIMUR
183	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
184	PENGADILAN NEGERI TUAL
185	PENGADILAN NEGERI TUBEI
186	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK
187	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU
188	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI
189	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG
190	PENGADILAN NEGERI WATES
191	PENGADILAN NEGERI WONOSARI
192	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
193	PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI
194	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
195	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
196	PENGADILAN TINGGI AGAMA J A M B I
197	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
198	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
199	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU
200	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
201	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
202	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
203	PENGADILAN TINGGI AGAMA PANGKAL PINANG

NO	SATUAN KERJA
204	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
205	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
206	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
207	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
208	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN
209	MAHKAMAH SYAR'IYAH I D I
210	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO
211	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG
212	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA
213	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE
214	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON
215	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH
216	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI
217	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG 3 REDELONG
218	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG
219	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKEL
220	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON
221	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
222	PENGADILAN AGAMA AMBON
223	PENGADILAN AGAMA ARSO
224	PENGADILAN AGAMA BANGIL
225	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
226	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
227	PENGADILAN AGAMA BANGLI
228	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
229	PENGADILAN AGAMA BANTAENG
230	PENGADILAN AGAMA BATAM
231	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN
232	PENGADILAN AGAMA BATURAJA
233	PENGADILAN AGAMA BEKASI

NO	SATUAN KERJA
234	PENGADILAN AGAMA BELOPA
235	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS
236	PENGADILAN AGAMA BIMA
237	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
238	PENGADILAN AGAMA BLITAR
239	PENGADILAN AGAMA BLORA
240	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI
241	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
242	PENGADILAN AGAMA BOROKO
243	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
244	PENGADILAN AGAMA BREBES
245	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
246	PENGADILAN AGAMA CIAMIS
247	PENGADILAN AGAMA CIBADAK
248	PENGADILAN AGAMA CURUP
249	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA
250	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPUPU
251	PENGADILAN AGAMA DEMAK
252	PENGADILAN AGAMA DENPASAR
253	PENGADILAN AGAMA DUMAI
254	PENGADILAN AGAMA ENREKANG
255	PENGADILAN AGAMA GIANJAR
256	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
257	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
258	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
259	PENGADILAN AGAMA JAMBI
260	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA
261	PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
262	PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN
263	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

NO	SATUAN KERJA
264	PENGADILAN AGAMA KAIMANA
265	PENGADILAN AGAMA KAJEN
266	PENGADILAN AGAMA KALABAHI
267	PENGADILAN AGAMA KALIANDA
268	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
269	PENGADILAN AGAMA KANGEAN
270	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
271	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM/AMLAPURA
272	PENGADILAN AGAMA KARAWANG
273	PENGADILAN AGAMA KARIMUN
274	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
275	PENGADILAN AGAMA KENDAL
276	PENGADILAN AGAMA KENDARI
277	PENGADILAN AGAMA KEPAHANG
278	PENGADILAN AGAMA KETAPANG
279	PENGADILAN AGAMA KOLAKA
280	PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
281	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN
282	PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
283	PENGADILAN AGAMA KOTOBARU
284	PENGADILAN AGAMA KRUI
285	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
286	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
287	PENGADILAN AGAMA KUPANG
288	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
289	PENGADILAN AGAMA LAHAT
290	PENGADILAN AGAMA LEBONG
291	PENGADILAN AGAMA LOLAK
292	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
293	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

NO	SATUAN KERJA
294	PENGADILAN AGAMA LUWUK
295	PENGADILAN AGAMA MAGETAN
296	PENGADILAN AGAMA MAJENE
297	PENGADILAN AGAMA MAKALE
298	PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
299	PENGADILAN AGAMA MALILI
300	PENGADILAN AGAMA MAMUJU
301	PENGADILAN AGAMA MANINJAU
302	PENGADILAN AGAMA MANNA
303	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI
304	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
305	PENGADILAN AGAMA MAROS
306	PENGADILAN AGAMA MASAMBA
307	PENGADILAN AGAMA MASOHI
308	PENGADILAN AGAMA MEDAN
309	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
310	PENGADILAN AGAMA MERAUKE
311	PENGADILAN AGAMA MESUJI
312	PENGADILAN AGAMA METRO
313	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
314	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
315	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH
316	PENGADILAN AGAMA MUARO BUNGO
317	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
318	PENGADILAN AGAMA NABIRE
319	PENGADILAN AGAMA NAMLEA
320	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN
321	PENGADILAN AGAMA PAINAI
322	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
323	PENGADILAN AGAMA PALU

NO	SATUAN KERJA
324	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
325	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG
326	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE
327	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI
328	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
329	PENGADILAN AGAMA PARE-PARE
330	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
331	PENGADILAN AGAMA PARIGI
332	PENGADILAN AGAMA PASURUAN
333	PENGADILAN AGAMA PATI
334	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBU
335	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
336	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
337	PENGADILAN AGAMA PEMALANG
338	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR
339	PENGADILAN AGAMA PENAJAM
340	PENGADILAN AGAMA PINRANG
341	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT
342	PENGADILAN AGAMA REMBANG
343	PENGADILAN AGAMA SALATIGA
344	PENGADILAN AGAMA SAMPIT
345	PENGADILAN AGAMA SANGATTA
346	PENGADILAN AGAMA SANGGAU
347	PENGADILAN AGAMA SAWAH LUNTO
348	PENGADILAN AGAMA SEKAYU
349	PENGADILAN AGAMA SELAYAR
350	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR
351	PENGADILAN AGAMA SERUI
352	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
353	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

NO	SATUAN KERJA
354	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
355	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
356	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
357	PENGADILAN AGAMA SINJAI
358	PENGADILAN AGAMA SINTANG
359	PENGADILAN AGAMA SLAWI
360	PENGADILAN AGAMA SLEMAN
361	PENGADILAN AGAMA SOA SIO
362	PENGADILAN AGAMA SO'E
363	PENGADILAN AGAMA SOREANG
364	PENGADILAN AGAMA SORONG
365	PENGADILAN AGAMA SRAGEN
366	PENGADILAN AGAMA SUKADANA
367	PENGADILAN AGAMA SUMBER
368	PENGADILAN AGAMA SUMENEP
369	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
370	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
371	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
372	PENGADILAN AGAMA SURABAYA
373	PENGADILAN AGAMA SUWAWA
374	PENGADILAN AGAMA TABANAN
375	PENGADILAN AGAMA TAHUNA
376	PENGADILAN AGAMA TAIS
377	PENGADILAN AGAMA TALIWANG
378	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
379	PENGADILAN AGAMA TANGERANG
380	PENGADILAN AGAMA TANJUNG
381	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN
382	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG
383	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP

NO	SATUAN KERJA
384	PENGADILAN AGAMA TARAKAN
385	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG
386	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
387	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI
388	PENGADILAN AGAMA TEGAL
389	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
390	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN
391	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
392	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
393	PENGADILAN AGAMA TONDANO
394	PENGADILAN AGAMA TUAL
395	PENGADILAN AGAMA TUBAN
396	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG
397	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU
398	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
399	PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
400	PENGADILAN AGAMA WATES
401	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
402	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
403	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
404	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
405	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
406	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
407	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
408	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
409	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
410	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
411	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
412	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
413	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI



NO	SATUAN KERJA
414	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
415	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
416	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM
417	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
418	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
419	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
420	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
421	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
422	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
423	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
424	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK
425	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
426	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
427	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
428	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG
429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG
430	PENGADILAN MILITER UTAMA
431	PENGADILAN MILITER TINGGI I DI MEDAN
432	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA
433	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA
434	PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
435	PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
436	PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK
437	PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
438	PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA
439	PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
440	PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
441	PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
442	PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
443	PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

NO	SATUAN KERJA
444	PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Sugiyanto

